



BAB II. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN KEHUTANAN DI PROVINSI PAPUA

2.1. Kondisi Kawasan Hutan Provinsi Papua

Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan diarahkan untuk meningkatkan kelestarian sumber daya hutan dan kemakmuran masyarakat. Selama tiga dekade terakhir, sumber daya hutan Papua dinilai telah memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja serta mendorong pembukaan isolasi dan pengembangan wilayah, pembangunan infrastruktur pada kawasan terisolir serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kehutanan di Provinsi Papua maka salah satu aspek penentu keberhasilan yang perlu mendapat perhatian adalah tersedianya suatu rencana yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segenap sumber daya tersedia yang bersifat indikatif dan antisipatif serta dapat diukur tingkat keberhasilannya dalam rangka menjawab tuntutan perkembangan baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.

Hutan merupakan modal dasar pembangunan, mempunyai fungsi : 1) fungsi ekologis atau fungsi penyangga kehidupan, mencakup fungsi pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem; 2) fungsi ekonomi, mencakup penghasil barang dan jasa baik kayu, non kayu, maupun kepariwisataan serta jasa lingkungan lain; 3) fungsi sosial, mencakup fungsi sosio-kultural mencakup berbagai sumber kehidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berupaya bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan di sekitar hutan, kepentingan pendidikan dan penelitian, guna pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), bahkan tempat pemujaan (religius).

Hakekat pembangunan di Provinsi Papua bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang semakin baik dan meletakkan landasan yang kokoh bagi pembangunan Papua di masa yang akan datang. Kongkritnya bahwa kesinambungan pembangunan harus dapat diwujudkan melalui program-program pembangunan yang bersifat strategis, sinergis dan berpihak kepada rakyat serta mengandung prinsip-prinsip keberlanjutan (*principles of sustainability*).

Ditinjau dari aspek pemanfaatan sumberdaya hutan, laju kerusakan hutan (*deforestasi*) dan penurunan kualitas hutan Provinsi Papua (*degradasi*) setiap tahun terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan manusia akan hasil hutan. Peningkatan kebutuhan manusia akan hasil hutan mendorong peningkatan kegiatan eksploitasi hutan. Pengelolaan hutan produksi di Provinsi Papua melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) telah berlangsung sejak tahun 1970an dan hingga sekarang areal hutan produksi (HP, HPT dan HPK) yang telah dibebani hak IUPHHK seluas 4.387.508 ha yang tersebar di 17 kabupaten. Areal konsesi IUPHHK ini potensial menyebabkan terjadinya degradasi hutan dan merupakan sumber emisi bila pengawasan terhadap implementasi system silvikultur dan tata kelola usaha tidak dilakukan secara intensif.

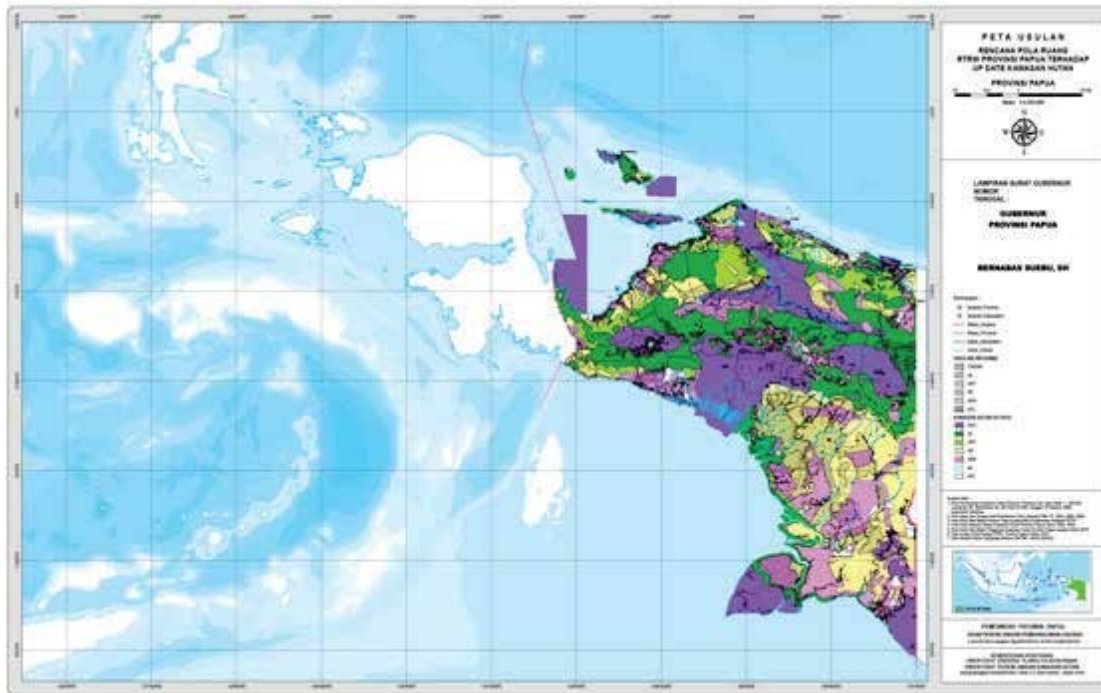
Tabel 2.1. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Provinsi Papua

NO	KABUPATEN / PEMEGANG IUPHHK	SK HPH / IUPHHK			KETERANGAN
		NOMOR	TGL	LUAS (HA)	
1	2	3	4	5	7
I	KAB JAYAPURA DAN KABUPATEN SARMI				
1	PT. Tunggal Yudhi Unit I (Jpr)	489/Kpts-II/95	14 Sep 95	69,400	Stagnasi sejak 2003
	JUMLAH I			69,400	
II	KABUPATEN KEEROM				
2	PT. Batasan	342/Kpts-II/97	01 Jun 97	106,643	Aktif
3	PT. Hanurata Coy. Ltd Jayapura	601/Menhut-II/2012	30 Oktober 2012	56,325	SK PERPANJANGAN IUPHHK
	JUMLAH II			162,968	
III	KABUPATEN SARMI				
4	PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II	723/Menhut-II/2011	12/20/2011	169,170	Aktif
5	PT. Bina Balantak Utama	SK. 365/Menhut-II/2011	07 Juli 2011	298,710	Aktif
6	PT. Mondialindo Setya Pratama	SK.466/MENHUT-II/2006	19 Sept 2006	94,800	Aktif
7	PT. Sumber Mitra Jaya Unit II	SK.556/MENHUT-II/2006	22 Des 2006	52,160	Aktif
8	PT. Salaki Mandiri Sejahtera	SK. 396/Menhut-II/2006	17 Juli 2006	79,130	Aktif
	JUMLAH III			693,970	
IV	KABUPATEN SARMI DAN JAYAPURA				
9	PT. Papua Hutan Lestari Makmur	334/Menhut-II/2009	15 Januari 2009	103,510	Aktif
10	PT. Sumber Mitra Jaya Unit I	SK.396/MENHUT-II/2005	23 Nop 05	102,250	Aktif
	JUMLAH IV			205,760	
V	KABUPATEN WAROPEN				
11	PT. Irmasulindo Unit Serui	04/Kpts-II/2001	11 Jan 01	174,540	Aktif
	JUMLAH V			174,540	
VI	KABUPATEN WAROPEN, PANIAI DAN MAMBERAMO RAYA				
12	PT. Wapoga Mutiara Timber Unit III	169/Kpts-II/97	25 Mar 97	407,350	Aktif
	JUMLAH VI			407,350	
VII	KABUPATEN NABIRE				
13	PT. Jati Dharma Indah PI	96/Kpts-II/97	31 Jan 97	163,930	Aktif
	JUMLAH VII			163,930	
VIII	KABUPATEN MIMIKA				
14	PT. Diadyani Timber	SK.292/MENHUT-II/09	18 Mei 2009	205,160	Aktif
15	PT. Alas Tirta Kencana	649/Kpts-II/95	30 Nop 95	87,500	Aktif
	JUMLAH VIII			292,660	
IX	KABUPATEN ASMAT, YAHUKIMO DAN MAPPI				
16	PT. Kayu Pusaka Bumi Makmur	70/Kpts-II/96	26 Feb 96	171,100	Stagnasi Sejak 2011
	JUMLAH IX			171,100	
X	KABUPATEN MAPPI DAN BOVEN DIGOEL				
17	PT. Mukti Artha Yoga	SK.57MENHUT-II/2007	22 Feb 2007	151,690	Mengurus RKU Basis IHMB di Pusat

	JUMLAH X			151,690	
XI	KABUPATEN BOVEN DIGOEL DAN PEG. BINTANG				
18	PT. Tunggal Yudhi Unit II (Mrk)	489/Kpts-II/95	14 Sep 95	203,600	Stagnasi sejak 2002
	JUMLAH XI			203,600	
XII	KABUPATEN BOVEN DIGOEL				
19	PT. Dharmali Mahkota Timber	248/Kpts-II/94	07 Jun 94	156,800	Stagnasi
20	PT. Tunas Sawaerma/Tunas Timber Lestari	SK.101/Menhut-II/2009	12 Maret 2009	214,935	Aktif
21	PT. Digul Daya Sakti Unit I	614/Kpts-II/95 Jo. 354/Kpts-II/1997	15 Nop 95 Jo. 9 Juli 1997	344,800	Pelaksanaan IHMB
22	PT. Digul Daya Sakti Unit II	614/Kpts-II/95 Jo. 354/Kpts-II/1997	15 Nop 95 Jo. 9 Juli 1997	103,200	Pelaksanaan IHMB
	JUMLAH XII			819,735	
XIII	KABUPATEN YAHUKIMO, MAPPI & BOVEN DIGOEL				
23	PT. Rimba Megah Lestari	303/Kpts-II/96	18 Jun 96	250,000	Stagnasi 2008
	JUMLAH XIII			250,000	
XIV	KABUPATEN YAHUKIMO, ASMAT & NDUGA				
24	PT. Global Partner Indonesia	SK.39/Menhut-II/2009	09 Pebruari 2009	144,940	Belum Beroperasi
	JUMLAH XIV			144,940	
XV	KABUPATEN MERAUKE DAN BOVEN DIGOEL				
25	PT. Merauke Rayon Jaya	05/Kpts-II/98 Jo SK.251/Menhut-II/08	1 Juli 2008	206,800	Belum Operasi
	JUMLAH XV			206,800	
XVI	KABUPATEN MERAUKE				
26	PT. Selaras Inti Semesta	SK.18/Menhut-II/2009	22 Januari 2009	169,400	Aktif
27	PT. Inocin Abadi	SK. 606/Menhut-II/2011	21 Oktober 2011	99,665	Aktif
	JUMLAH XVII			269,065	
	TOTAL			4,387,508	

Sumber: Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, 2012

Luas hutan Papua sesuai perhitungan terakhir adalah 31.228.696 Ha. Apabila Tata Hutan berdasarkan fungsi peruntukannya di Papua ditumpang susun (*overlay*) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pembangunan (RTRWP) terhadap tutupan lahan tahun 2006 – 2011, maka akan dijumpai fakta sebagai berikut: Areal Penggunaan Lain (APL) bertambah 401.975 ha (+47,7%), Hutan Lindung bertambah 3.151.028 ha (+43,8%), Hutan Produksi berkurang 4.960.251 ha (-60%), HPK berkurang 2.847.146 ha (-43,9%), HPT bertambah 4.338.821 ha (+237,7%), KSA/KPA bertambah 312.225 ha (+4,4%). Fakta ini mengindikasikan bahwa pemerintah Papua benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang konservatif dan berwawasan lingkungan. Namun demikian sempitnya alokasi hutan untuk fungsi produksi dan hutan produksi konversi masih perlu diperdebatkan. Karena kebutuhan pembangunan yang bersumber dari hasil hutan dan lahan untuk kepentingan infrastruktur wilayah semakin hari semakin meningkat, ketersediaan areal hutan untuk produksi dan untuk dikonversi kemungkinan tidak mampu mengimbangi tuntutan peningkatan kebutuhan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.



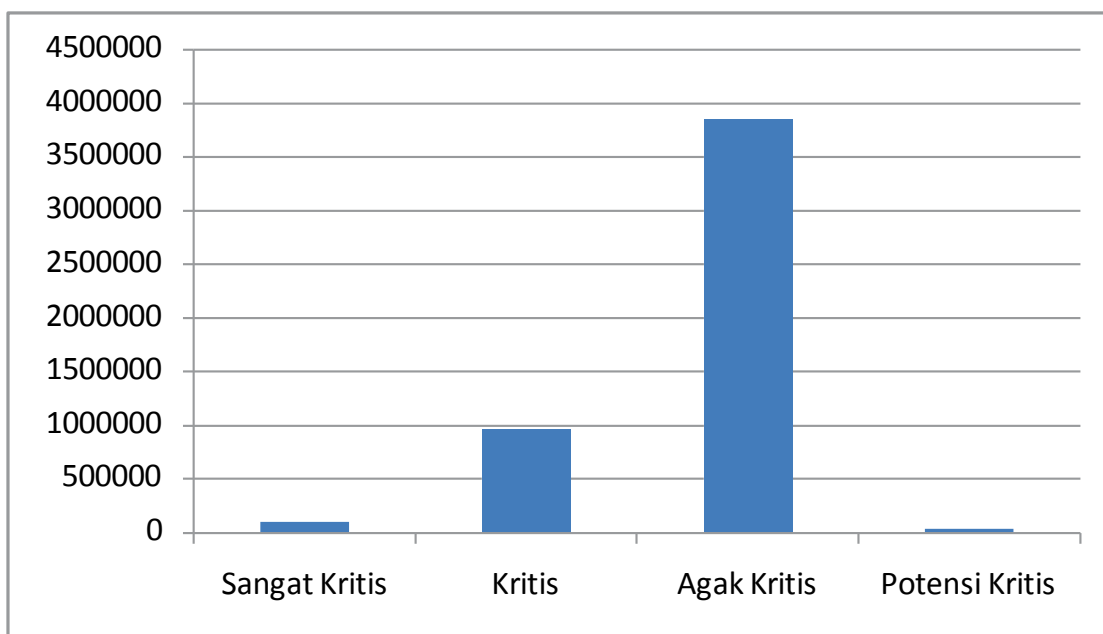
Gambar 2.1. Peta usulan pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua.

2.2. Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Papua

Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia secara umum disebabkan sistem kebijakan politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumberdaya hutan sebagai sumber pendapatan bagi kepentingan politik dan keuntungan pribadi (FWI/ GFW, 2001).

Undang-undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 memberi makna yang besar guna mampu memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Implementasi Otsus juga telah memunculkan eforia berlebihan terutama dari aspek tuntutan pemekaran wilayah kabupaten/kota yang berlebihan dengan harapan untuk memperoleh keadilan dan pemerataan pembangunan. Tuntutan pemekaran akan berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk infrastruktur pembangunan yang pada akhirnya akan berimplikasi pada meningkatnya luas kawasan hutan yang akan dikonversi bagi kepentingan non hutan.

Greenpeace mencatat laju kerusakan hutan di Bumi Cenderawasih tiap tahun mencapai 300 ribu hektare (ha). Kerusakan terparah di bagian selatan Papua dan sejumlah wilayah yang memiliki perkebunan sawit raksasa. Itu data kita pada penelitian tahun 2009 dan 2010. Kerusakan hutan setelah itu bisa saja bertambah,” kata Charles Tawaru, Koordinator Greenpeace di Papua, Jumat, 10 Agustus 2012. Ia mengatakan, mega proyek Merauke Integrated Food dan Energy Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke serta aktivitas penebangan oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan, berperan besar meningkatkan deforestasi di Papua.



Gambar 2.2. Kondisi lahan kritis menurut tingkat kekritisan di Provinsi Papua, 2010

Menurut data Statistik Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Tahun 2010 menunjukkan bahwa angka deforestasi di dalam dan diluar kawasan hutan seluas 169.100 hektar/tahun. Selanjutnya menurut sumber yang sama bahwa lahan kritis di Provinsi Papua mencapai 4.976.051 hektar. Tingkat kekritisan kawasan hutan di Provinsi Papua sebagaimana terlihat pada histogram pada Gambar 2.2.

Sebaran luas lahan tidak produktif di masing-masing kabupaten menurut tingkat kekritisan lahan di Provinsi Papua seperti disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Sebaran luas lahan kritis menurut fungsi kawasan hutan dan tingkat kekritisan di Provinsi Papua

NO	Kawasan Hutan Luas	Luas Lahan Kritis di Provinsi Papua (Ha)				
		SK	K	AK	PK	Jumlah
1	KSA/KPA	25,383	97,511	839,451		962,345
2	HL	39,693	412,255	349,712	365	802,025
3	HPT	5,538	29,078	35,537	1,465	71,618
4	HP	6,175	78,490	1,234,760	3,930	1,323,355
5	HPK	23,687	297,704	1,154,853	5,776	1,482,020
6	APL	2,129	53,814	244,759	33,883	334,585
Jumlah		102,605	968,852	3,859,072	45,419	4,975,948

Keterangan : Sk = sangat kritis; K = kritis; AK = agak kritis; PK = potensial kritis Sumber : Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Mamberamo, 2011.

Data pada Tabel 2.2. memperlihatkan bahwa luas lahan kritis yang berada di dalam kawasan suaka alam/pelestarian alam (KSA/KPA) dan Hutan Lindung (HL) masing-masing 962.345 ha dan 802,025 ha. Fakta ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kegiatan perambahan dalam kawasan yang seharusnya dikonservasi. Kegiatan perambahan ini terjadi selain sebagai akibat adanya pemekaran wilayah kabupaten pada kawasan tersebut, tetapi juga diduga karena kegiatan pengelolaan yang belum intensif. Banyak faktor yang berperan dalam pembentukan lahan-lahan kritis tersebut yang perlu diidentifikasi sehingga dapat ditentukan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Sebaran luas lahan kritis menurut kabupaten di provinsi Papua seperti disajikan pada Tabel 2.3. Sebaran luas lahan kritis menurut kabupaten/kota dan tingkat kekritisannya di Provinsi Papua.

NO	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kritis di Provinsi Papua (Ha)				
		SK	K	AK	PK	Jumlah
1	Merauke	487	29,105	2,389,672		2,419,264
2	Jayawijaya	2,478	54,951	53,818		111,247
3	Jayapura	7,408	21,729	28,904	14,224	72,265
4	Nabire	11,184	31,923	54,934	1,886	99,927
5	Yapen	1,123	8,695	5,306		15,124
6	Biak	3,391	18,123	37,918	531	59,963
7	Paniai	4,230	39,988	21,072		64,290
8	Puncak Jaya	2,327	42,303	10,123		54,753
9	Mimika	13,300	22,364	22,797		59,461
10	Boven Digoel	170	7,078	164,520	19,257	191,025
11	Mappi	306	61,601	655,205	1,973	719,085
12	Asmat		714	79,543		80,257
13	Yahukimo	15,123	141,486	15,991		202,600
14	Pegunungan Bintang	2,025	105,343	15,086		122,454
15	Tolikara	595	56,065	27,210		83,870
16	Sarmi	161	2,967	23,471		26,599
17	Keerom	129	3,708	26,165	7,466	37,468
18	Waropen	158	20,186	42,168	82	62,594
19	Supiori	48	1,477	4,571		6,096
20	Mamberamo Raya	833	16,972	89,527		107,332
21	Nduga	677	23,558	1,726		25,961
22	Lanny Jaya	194	53,130	12,054		65,378
23	Mamberano Tengah	57	26,059	13,922		40,038
24	Yalimo	584	21,512	8,587		30,683
25	Puncak	21,371	31,835	15,856		69,062
26	Dogiyai	4,220	29,871	19,685		53,776
27	Intan Jaya	8,624	56,147	8,517		73,288
28	Deiyai	821	2,439	344		3,664
29	Kota Jayapura	522	8,522	10,381		19,425
Jumlah		102,606	968,851	3,859,073	45,419	4,975,949

Keterangan : Sk = sangat kritis; K = kritis; AK = agak kritis; PK = potensial kritis Sumber : Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Mamberamo, 2011.

2.3. Pemerintah Provinsi Papua mengambil kebijakan bahwa hingga 2011 dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman hayati di Provinsi Papua, telah menetapkan kawasan konservasi yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) sebanyak 11 unit terdiri dari 7 unit CA dan ditambah dua unit Taman Nasional (TN) dengan luasan mencapai 6.211.688 ha. Rincian luas kawasan konservasi Komposisi di Provinsi Papua menurut status kawasan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.4

Tabel 2.4. Luas kawasan konservasi di Provinsi Papua

No	Kawasan Konservasi	Luas (Ha)
1.	Taman Nasional	
	a. Lorentz	2.505.600
	b. Wasur	413.810
2.	Cagar Alam	
	a. Pegunungan Cycloop	22.500
	b. Pegunungan Wayland	128.220,23
	c. Bupul	92.000
	d. Yapen Tengah	119.000
	e. Biak Utara	6.138,04
	f. Pulau Supiori	41.990
	g. Tanjung Wiay	4.378,70
3.	Suaka Margasatwa	
	a. Danau Bian	100.000
	b. Pulau Dolok	664.627,97
	c. Pulau Pombo	100
	d. Pulau Savan	8.260
	e. Pulau Komolom	84.000
	f. Mamberamo Foja	2.018.300
	g. Jayawijaya	800.00
4.	Taman Wisata Alam	
	a. Teluk Youtefa	1.675
	b. Nabire	100
	Jumlah	6.211.688

Sumber : Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, 2011.

Berdasarkan data luas kawasan yang dikonservasi di Papua, ternyata terdapat beberapa kawasan yang telah mengalami perambahan dan pembalakan liar yang sistematis di Papua. Data kawasan konservasi di Provinsi Papua yang mengalami deforestasi dan degradasi di Provinsi Papua selama periode tahun 2006-2011 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Kawasan konservasi di Provinsi Papua yang mengalami deforestasi dan degradasi selama periode tahun 2006-2011.

No	Kawasan Konservasi	Luas	Deforestasi (ha)	Degradasi (ha)
1	CA Tanjung Wiay	6,646.95	11.47	1,389.00
2	CA Yapen Tengah	112,700.25	967.38	5.24
3	SM Mamberamo-Foja	1,667,820.16	8,383.15	36,090.23
4	TN Loretz	2,339,759.96	8,212.19	7,629.65
	Jumlah	4,126,927.32	17,574.19	45,114.12

Bentuk kerusakan hutan konservasi akibat pembalakan liar seperti terlihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Kegiatan Penebangan liar dan bentuk kerusakan hutan yang terjadi di Cagar Alam Biak Utara pada ruas jalan Biak-Sorendiwari, (Foto oleh :Alfred Antoh, Desember 2011)

“Sekilas melihat kayu-kayu gergajian yang ditemukan di sepanjang jalan tersebut memberi gambaran bahwa kayu olahan tersebut telah dikomersilkan atau sudah dipasarkan ke cukong-cukong (Pembeli Kayu secara illegal) tertentu. Pembiaran aktivitas kegiatan illegal tersebut dapat mempercepat kerusakan hutan dan kawasan Cagar Alam Biak Utara sudah barang tentu akan terdegradasi. Beberapa informasi yang diperoleh di lapangan mengindikasikan bahwa beberapa jenis kayu diangkat untuk kebutuhan infrastruktur bangunan fisik di Sorendiwari, Kabupaten Supiori. Hal ini amat sangat membahayakan eksistensi Cagar Alam Hutan Biak Utara. Apabila terjadi pembiaran seperti ini maka Cagar Alam ini hanya akan meninggalkan cerita bahwa pernah ada hutan Cagar Alam di daerah ini.” (Laporan Antoh dkk - Tim Pungumpul Data SRAP REDD+ Zona Utara, 2012).

Walaupun secara hukum dan peraturan pemerintah telah berusaha menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, namun pada kenyataannya seperti telah diuraikan di atas bahwa kerusakan hutan masih terus terjadi pada kawasan yang di konservasi seperti Taman Nasional Wasur.



Gambar 2.4. Kerusakan Hutan Akibat Penabangan/Pembukaan Lahan di Taman Nasional Wasur (Foto : Alfred Antoh, Oktober 2012).

Potret kerusakan hutan akibat penebangan liar dan perambahan hutan seperti di atas di Papua akan terus terjadi untuk berbagai suplai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yang memanfaatkan hutan dan lahan. Teladan: masyarakat mengambil kayu dan juga menjadikan kawasan yang telah ditetapkan untuk kawasan konservasi sebagai areal berusaha tani dan pembukaan areal permukiman baru. Sebagian areal hutan juga digunakan untuk pembangunan fisik baik gedung, bangunan sekolah, jalan dan jembatan.



Gambar 2.5. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Sarmi (Foto :Alfred Antoh, Oktober 2012)

Degradasi luas hutan juga sebagian besar terjadi sebagai akibat pemanfaatan areal hutan areal hutan untuk pembangunan jalan dan jembatan guna menghubungkan kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Contoh : untuk membangun jalan dan jembatan di Kabupaten Sarmi membutuhkan luas 371.184 m² (Dinas PU Kabupaten Sarmi, Oktober 2012). Semakin banyak wilayah pemekaran baru, semakin panjang infrastruktur dasar yang diperlukan untuk menghubungkan antar wilayah pemekaran dengan kabupaten induk, semakin luas pula areal hutan yang akan terbuka.

Meningkatnya penggunaan areal hutan yang dikonversi untuk berbagai kepentingan memberi peringatan dan gambaran bahwa laju deforestasi hutan di Papua cukup tinggi. Semakin meningkatnya aktivitas pembangunan fisik, semakin luas areal yang dikonversi, akan semakin luas pula kebutuhan alih fungsi kawasan. Inilah dampak bila motif kebijakan yang menganggap sumberdaya hutan hanya dinilai manfaat ekonomi semata, tanpa memperdulikan manfaat ekologis dan nilai jasa dari hutan.

Akibat dari kebijakan pembangunan dan kebutuhan konversi hutan untuk wilayah pemekaran serta aktivitas perambahan lain telah terjadi deforestasi dan degradasi hutan yang memungkinkan menurunnya daya serap karbon oleh hutan dan sekaligus menurunkan sediaan karbon hutan. Data rata-rata deforestasi dan degradasi hutan serta perubahan tutupan lahan lain (Other Land Cover Change) tahunan sebagai sumber emisi di provinsi Papua disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Luas deforestasi, degradasi dan perubahan tutupan lahan lain di Provinsi Papua sebagai sumber emisi pada setiap fungsi kawasan.

No	Zona	Sumber Emisi						Total	
		Deforestasi		Degradasi		OLCC		Luas (ha)	%
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%		
1	Kawasan Suaka Alam/ Pelestarian Alam	5,505.16	2.46	19,008.34	8.49	9,315.28	4.161	33,828.78	15.11
2	Hutan Lindung	4,524.02	2.02	14,179.36	6.33	2,141.72	0.957	20,845.10	9.31
3	Hutan Produksi	2,408.40	1.08	79,445.90	35.49	24.86	0.011	81,879.16	36.57
4	Hutan Produksi Konversi	3,938.62	1.76	29,244.66	13.06	1,403.72	0.627	34,587.00	15.45
5	Hutan Produksi Terbatas	3,107.98	1.39	34,525.28	15.42	1,422.10	0.635	35,055.36	17.44
6	Areal Penggunaan Lain	6,195.46	2.77	5,367.38	2.40	2,122.08	0.948	13,684.92	6.11
Total		25,679.64	11.47	181,770.92	81.19	16,429.76	7.339	223,880.32	100.00

Sumber : Hasil analisis tutupan lahan 2006-2011

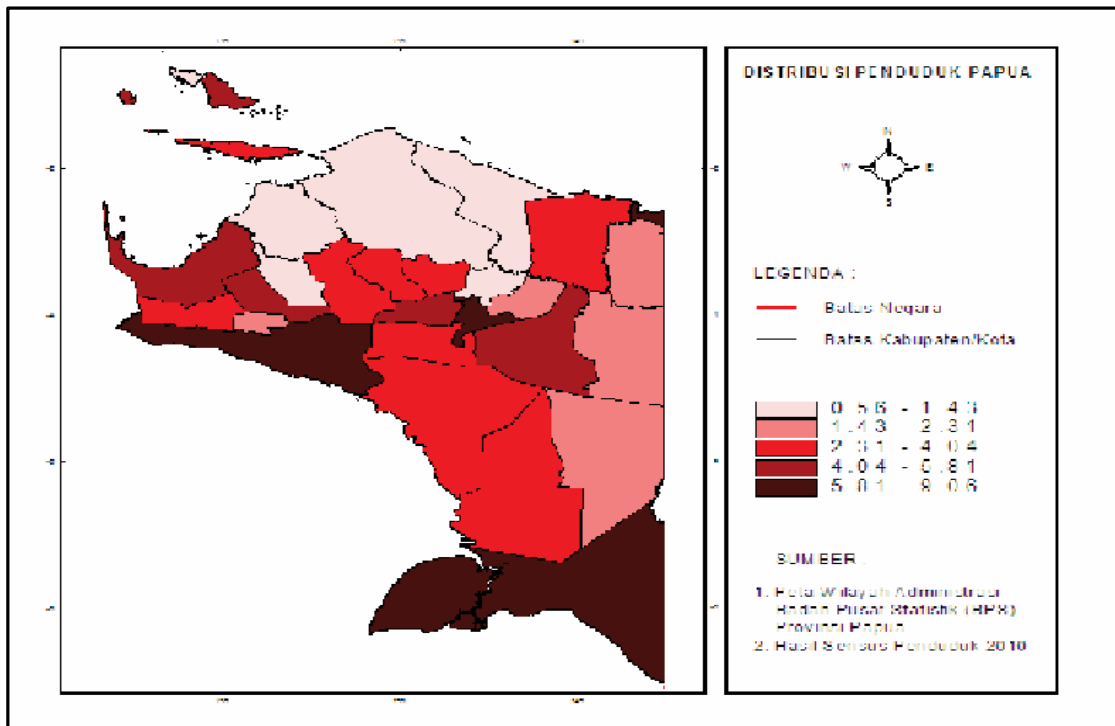
Data pada Tabel mengindikasikan suatu fenomena yang menarik, yang mana pada persentase luas deforestasi yang terjadi di KSA/PA (Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam) dan HL (Hutan Lindung) lebih tinggi dibanding deforestasi pada HP, HPL dan HPK. Hal ini diduga sebagai akibat adanya konversi hutan untuk kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik umum pada kabupaten pemekaran yang berada di kawasan KSA/PSA dan HL. Sedangkan degradasi hutan juga pada kedua fungsi kawasan hutan tersebut memiliki prosentase luas relatif tinggi walaupun masih lebih rendah dari HP, HPT dan HPK. Fakta ini menunjukkan bahwa kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi dan hutan lindung belum intensif dan kegiatan perambahan belum dapat dikendalikan. Masalah ini perlu menjadi isu utama yang perlu dipertimbangkan dalam mengimplementasikan aksi mitigasi dalam skema REDD+ di Papua.

2.3. Kondisi Demografi dan Dampaknya Terhadap Hutan di Papua

2.3.1. Penduduk Papua Hasil Sensus 2010

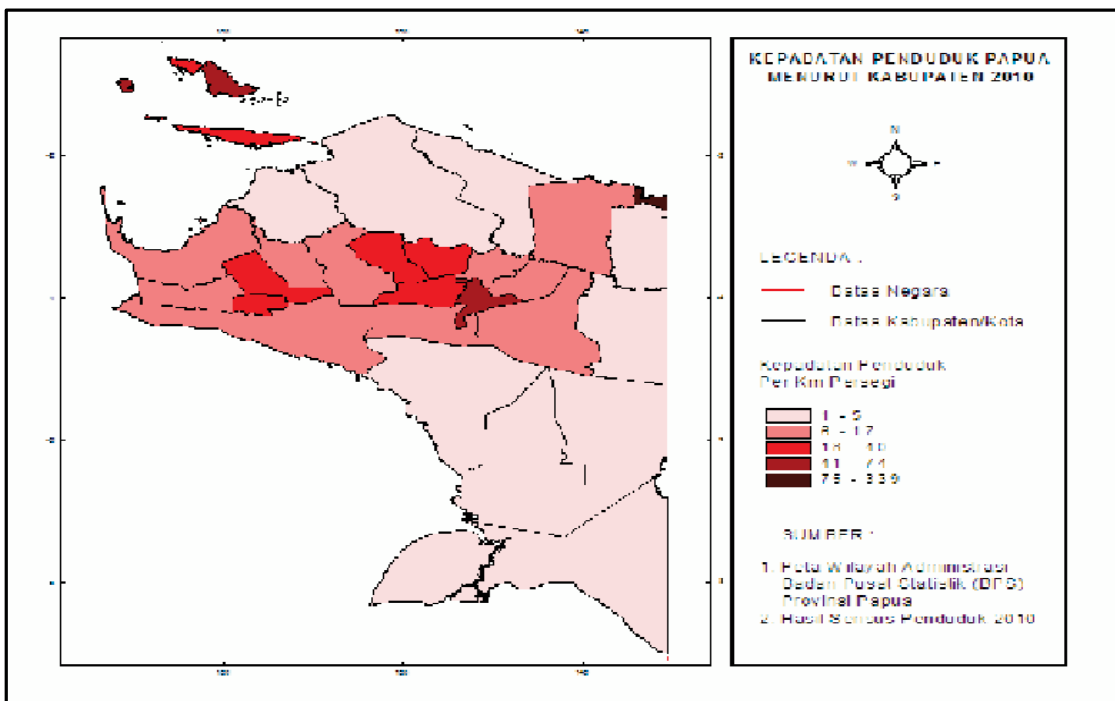
Penduduk Papua berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 berjumlah 2.833.381 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 735 629 jiwa (25,96 persen) dan di daerah pedesaan sebanyak 2.097.752 jiwa (74,04 persen). Hal ini memberikan gambaran bahwa penduduk Papua sebagian besar masih berada di pedesaan atau kampung yang secara langsung berinteraksi dengan hutan. Walaupun penduduk Papua sebagian besar berada di kampung namun penyebarannya tidak merata, konsentrasi penyebaran penduduk Papua masih bertumpu pada kabupaten/kota yang telah berdiri cukup lama. Sebagian besar penduduk Papua berada di Kota Jayapura (9,06 persen), Kabupaten Jayawijaya (6,92 %), Merauke (6,91 %), dan Kabupaten Mimika (6,42 %). Kabupaten dengan persentase penduduk < 1 % adalah Waropen (0,87 %), Mamberamo (0,65%), dan Supiori (0,56 %). Kabupaten lain di provinsi Papua dengan persentase > 1 hingga < 6 % terhadap jumlah penduduk seluruh Papua (BPS Provinsi Papua, 2010). Pemusatan dan persebaran jumlah penduduk demikian menunjukkan keberagaman kepadatan penduduk terhadap luas wilayahnya.

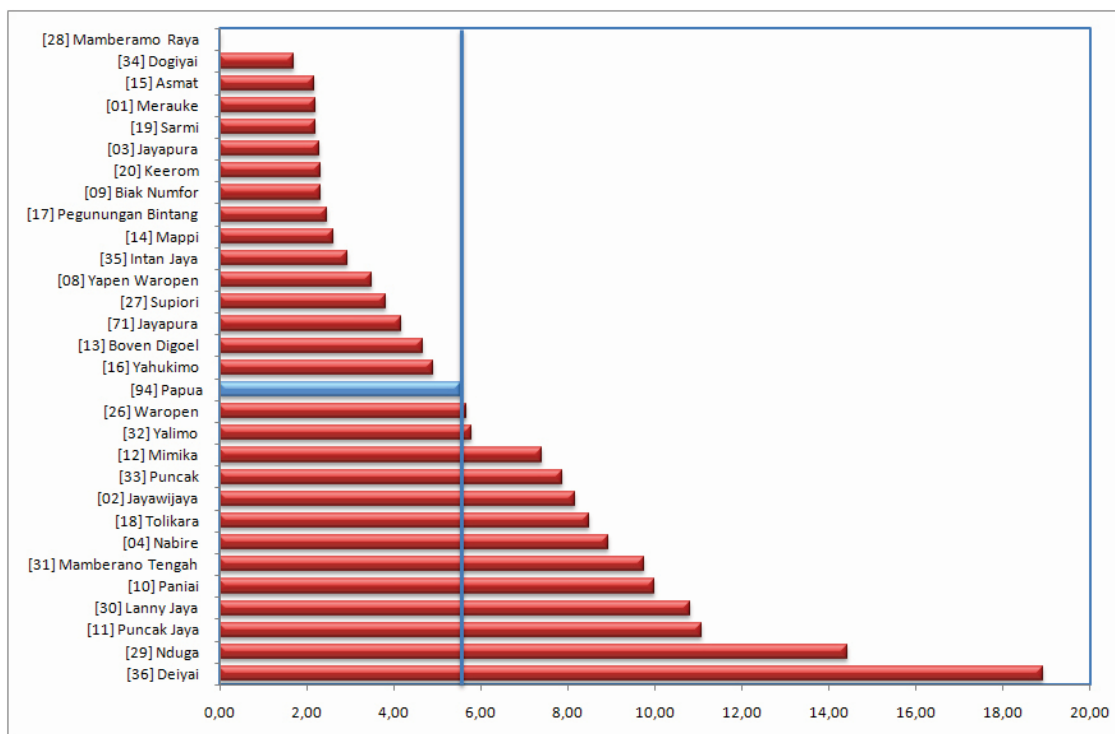
Gambar 2.6. Distribusi Penduduk Papua berdasarkan tingkat kepadatan (BPS Prov Papua, 2010)



Dengan membandingkan luas wilayah Provinsi Papua dan jumlah penduduk maka diperoleh tingkat kepadatan penduduk sebanyak 9 orang per km². Kota Jayapura adalah daerah yang paling padat dengan tingkat kepadatan mencapai 339 orang per kilometer persegi.

Gambar 2.7. Tingkat Kepadatan penduduk Provinsi Papua (BPS Papua, 2010)





Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Papua tahun 2000-2010 (BPS Papua, 2010).

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Papua per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 5,55 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Deiyai adalah yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Papua yakni sebesar 18,91 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Mamberamo yakni sebesar 0,02 persen. Kota Jayapura walaupun menempati urutan pertama dari jumlah penduduk di Provinsi Papua namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk adalah *relative moderat* yakni sebesar 4,16 persen. Penduduk Papua masih lebih dominan dibanding penduduk non Papua dimana persentase penduduk Papua rata-rata mencapai 76,21 persen, sedangkan penduduk non Papua hanya 23,79 persen.

Tabel 2.7. Jumlah penduduk asli Papua dan non Papua di Provinsi Papua berdasarkan kabupaten/kota pada Tahun 2010.

Kabupaten/ Kota	Papua	Non Papua	Total	Persentase Papua
Merauke	73,082	122,634	195,716	37.34
Jayawijaya	177,698	18,387	196,085	90.62
Jayapura	68,430	43,513	111,943	61.13
Nabire	62,119	67,774	129,893	47.82
Kepulauan Yapen	64,338	18,613	82,951	77.56
Biak	93,482	33,316	126,798	73.73
Paniai	149,427	4,005	153,432	97.39
Puncak Jaya	99,339	1,809	101,148	98.21
Mimika	75,267	106,734	182,001	41.36
Boven Digoel	37,355	18,429	55,784	66.96
Mappi	72,390	9,268	81,658	88.65
Asmat	68,641	7,936	76,577	89.64
Yahukimo	162,194	2,318	164,512	98.59
Pegunungan Bintang	62,361	3,073	65,434	95.30

Tolikara	113,315	1,112	114,427	99.03
Sarmi	22,935	10,036	32,971	69.56
Keerom	19,725	28,811	48,536	40.64
Waropen	20,396	4,243	24,639	82.78
Supiori	15,283	591	15,874	96.28
Mamberamo Raya	17,088	1,277	18,365	93.05
Nduga	78,377	676	79,053	99.14
Lanny Jaya	148,354	168	148,522	99.89
Mamberamo Tengah	39,315	222	39,537	99.44
Yalimo	50,327	436	50,763	99.14
Puncak	92,510	708	93,218	99.24
Dogiyai	83,395	835	84,230	99.01
Intan Jaya	40,414	76	40,490	99.81
Deiyai	61,565	554	62,119	99.11
Kota Jayapura	90,196	166,509	256,705	35.14
Total	2,159,318	674,063	2,833,381	76.21

Sumber : BPS Papua, 2010

2.3.2. Sebaran Kampung

Penduduk asli Papua telah lama tinggal dan menetap dalam kawasan hutan dan memiliki wilayah adat dan tersebar di berbagai lahan dengan status hutan yang ada. Jumlah kampung di Provinsi Papua tahun 2010 adalah 2.113 kampung. Kampung yang berada di dalam Hutan Konservasi sebanyak 189 kampung (9,0%), kampung di dalam kawasan Hutan Lindung sebanyak 399 kampung (19 %), di dalam kawasan Hutan Produksi terdapat 467 kampung (22%), sebaran kampung terbanyak ada di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi yaitu 711 kampung (34%). Sedangkan jumlah kampung di dalam Areal Penggunaan Lain sebanyak 333 kampung (16%). Sebaran jumlah kampung menurut fungsi dan tipe kawasan hutan seperti disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Sebaran kampung berdasarkan kawasan hutan dan tipe hutan

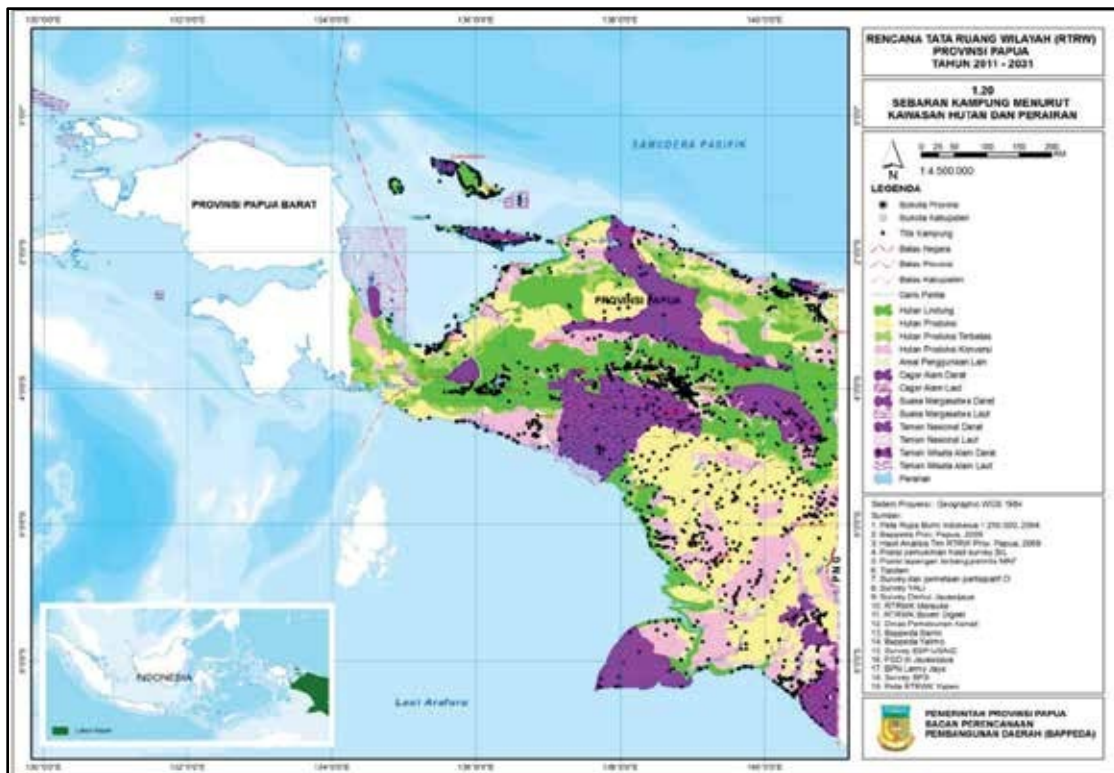
Kampung di Kawasan Hutan	Hutan Primer	Hutan Sekunder	Non Hutan	Jumlah dan (%)
Hutan Konservasi	58	29	102	189 (9%)
Hutan Lindung	112	44	243	399 (19%)
Hutan Produksi	114	106	247	467 (22%)
Hutan Produksi Konversi (HPK)	130	80	501	711 (34%)
Jumlah pada Kaw. Hutan	414	259	1.093	1.766 (84%)
Areal Peng Lain	16	22	295	333 (16%)
Jumlah	435 (21%)	283 (13%)	1.395 (66%)	2.113 (100%)

Sumber: RTRW Provinsi Papua, 2012

Sebaran pemukiman kampung berdasarkan tipe hutan kampung-kampung tersebar di Hutan Primer sebanyak 435 (21 %), di dalam Hutan Sekunder sebanyak 283 kampung (13 %) dan di dalam tipe non Hutan sebanyak 1.395 kampung atau (66 %).

Memperhatikan data sebaran kampung menurut fungsi kawasan hutan dan tipe hutan di atas mengindikasikan bahwa sebanyak 84 % pemukiman penduduk berada di dalam dan di pinggir kawasan hutan, sedangkan hanya 16 % yang berada di luar kawasan hutan. Fakta ini mengindikasikan bahwa kehidupan masyarakat Papua sangat bergantung pada keberadaan hutannya dan akibat ketergantungan tersebut maka tidak mustahil bahwa interaksi masyarakat dengan hutan sangat intensif. Intensifikasi interaksi ini merupakan tantangan, sekaligus berpotensi sebagai ancaman atas kegiatan pengelolaan dan pelestarian hutan. Banyaknya pusat-pusat pemukiman yang berada dalam kawasan hutan, terutama di dalam kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi merupakan peluang untuk mengimplementasikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yang mana masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan dapat berperan aktif dalam pengelolaan hutan adatnya. Namun sebaliknya dibutuhkan strategi khusus yang benar-benar dapat mendorong masyarakat agar secara sadar mau berpartisipasi aktif untuk mengelola hutan sebagai bagian dari budaya mereka. Hal ini sering bertentangan dengan prinsip pengelolaan hutan berbasis investasi yang memandang masyarakat hanyalah sebagai obyek dalam kegiatan investasi atau usahanya. Hal ini akan menjadi salah satu permasalahan yang akan dihadapi dalam implementasi rencana aksi REDD+ di Papua.

Gambar 2.9. Peta sebaran kampung menurut kawasan hutan dan perairan di Provinsi Papua (RTRW Provinsi Papua, 2012)



2.3.3. Pemukiman Transmigrasi

Pelaksanaan program transmigrasi di Papua dilaksanakan sejak pra PELITA sampai dengan sekarang dengan jumlah transmigran yang telah ditempatkan di Propinsi Papua sebanyak 147 UPT atau 53.853 KK atau 207.277 jiwa. Luas lahan yang digunakan untuk pembangunan permukiman transmigrasi dari 9 (sembilan) Kabupaten seluas 231.620 Ha, dari luas lahan yang dicadangkan dan potensial untuk lokasi permukiman sebanyak 906.857 Ha, sehingga sisa lahan yang belum dibuka 675.237 Ha. Luas lahan yang dicadangkan sebanyak 906.857 Ha, yang telah mempunyai SK. Pelepasan kawasan hutan sebanyak 15 Kawasan (lokasi) seluas 92.304,10 Ha, telah ada persetujuan prinsip pelepasan kawasan Hutan sebanyak 74 lokasi/kawasan seluas 115.026,83 Ha (*Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemukiman Prov Papua, 2012*).

Sejak diberlakukannya otonomi khusus bagi Provinsi Papua program transmigrasi tidak lagi dilaksanakan hal ini diperkuat dengan Perdasu Nomor 15 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa program transmigrasi akan dilaksanakan setelah jumlah orang Asli Papua mencapai jumlah 20 (dua puluh) juta jiwa (pasal 44 ayat 1). Melalui kebijakan ini diharapkan luas kawasan hutan yang ada tetap dapat dipertahankan dengan memanfaatkan sisa lahan dari luas lahan yang telah di alokasikan.

Tabel 2.9. Luas areal pemukiman transmigrasi yang telah dimanfaatkan dan sisa areal yang belum dimanfaatkan.

No	Lokasi/Kabupaten	Luas Areal (Ha)	Luas areal yang telah dimanfaatkan	Sisa Areal
1	Jayapura	40.150	13.360	26.790
2	Keerom	76.172	36.890	39.282
3	Sarmi	92.000	20.690	71.310
4	Paniai/Nabire	135.610	27.586	108.024
5	Biak Numfor	100	38	62
6	Merauke	155.000	111.336	42.664
7	Yapen Waropen	260.250	7.960	252.290
8	Jayawijaya	1.500	0	1.500
9	Mimika	146.075	13.760	132.315
	Jumlah	906.857	231.620	675.237

Sumber: Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemukiman, 2012

Luas areal 675,237 ha merupakan lahan usaha II (lahan cadangan transmigran) yang difungsikan sebagai lahan usaha tanaman keras atau perkebunan. Areal inilah yang menjadi perhatian investor di bidang perkebunan dan kehutanan (usaha izin pemanfaatan kayu/IPK), karena lahan ini dikategorikan sebagai APL (Areal Penggunaan Lain). Namun bila dilihat dari potensi tegakan dan tutupan hutannya, areal-areal tersebut masih layak untuk dipertahankan sebagai hutan. Inilah dilema pengelolaan hutan alam di Papua, yang mana masih menyisahkan areal hutan konversi untuk dapat dijadikan lahan non hutan.

2.3.4. Menempatkan Masyarakat Adat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Papua memiliki budaya yang tinggi; salah satu indikatornya adalah bahasa daerah yang mewakili suku-suku di Papua dan ini menjadi dasar bahwa perencanaan pembangunan termasuk strategi dan rencana aksi REDD+ Provinsi. Papua harus melibatkan masyarakat adat

dalam pengelolaan sumberdaya hutan baik yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan. Masyarakat adat memandang bahwa semua hutan yang berada dalam wilayah hukum adatnya adalah hutan adat yang mereka miliki dan dapat mereka manfaatkan untuk pencukupan seluruh kebutuhan hidupnya. Sebaliknya pemerintah menganggapnya sebagai hutan Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah bagi kemakmuran rakyat. Kedua perbedaan anggapan dan pemahaman ini akan terus menjadi pertentangan selama tidak ada kebijakan kompromistik yang dilakukan kedua belah pihak (lihat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012). Dalam kaitannya dengan SRAP-REDD+ ini, soal perbedaan ini dapat menjadi salah satu kondisi pemungkin yang harus disediakan lebih awal. Kondisi ini dapat diciptakan melalui adanya kebijakan untuk melakukan pemetaan partisipatif Areal hutan masyarakat hukum adat yang nantinya diintegrasikan dalam RTRWP/RTRWK. Batas lahan/hutan masyarakat hukum adat harus terdeleniasi dalam setiap struktur dan pola ruang pembangunan dalam RTRWP/RTRWK. Dengan demikian masyarakat merasa ada pengakuan dan sekaligus legitimasi pemerintah terhadap hak-hak adat masyarakat atas lahan/hutan.

2.4. Permasalahan Utama Deforestasi dan Degradasi Hutan di Papua

Secara umum deforestasi dapat diklasifikasikan menjadi deforestasi terencana dan tidak terencana. Berkurangnya luas kawasan hutan untuk keperluan penggunaan lahan non-hutan dikelompokkan kedalam “deforestasi terencana”. Deforestasi terencana ini bisa disebabkan oleh konversi hutan sebagai akibat dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), konversi untuk keperluan perizinan untuk penggunaan lahan di luar kehutanan seperti perkebunan dan pertambangan. Dalam kawasan hutan, pembukaan hutan tidak terencana dan degradasi dipicu oleh: (i) pembalakan liar dan pengelolaan hutan secara tidak berkelanjutan; (ii) alih guna hutan alam menjadi hutan tanaman, perkebunan dan pertambangan; dan (iii) penegakan peraturan pengelolaan hutan yang lemah.

Meningkatnya laju deforestasi hutan di Papua saat ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya usaha penebangan liar (illegal logging) baik yang dilakukan oleh pengelola sumberdaya hutan maupun oleh masyarakat. Juga minimnya kontrol dalam pengelolaan sumberdaya hutan melalui sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH), konversi sumberdaya hutan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan transmigrasi, kebakaran hutan serta tidak adanya pengakuan dan kepastian hak penguasaan akan sumberdaya lahan dan hutan (*land tenure right*) bagi masyarakat hukum adat yang sering menimbulkan konflik sosial. Seperti diketahui menurut RTRW Provinsi Papua yang secara teknis telah disahkan Menteri Kehutanan tahun 2012, tampak bahwa hampir 80% sebaran kampung di Papua berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Selain itu Penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pemekaran wilayah (Kabupaten/kota) yang kemudian diikuti oleh pemekaran distrik dan kampung juga memberi dampak pada deforestasi dan degradasi hutan. Tanpa pelaksanaan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), maka dapat berpotensi terjadinya open akses terhadap kawasan hutan di Papua.

Gambar 2.10. Potret pemicu deforestasi dan degradasi hutan di Papua: Aktivitas HPH, Pembangunan sarana fisik pemerintahan “bangunan kantor” dan pembangunan jalan untuk menghubungkan kampung-kampung di kabupaten pemekaran, Mamberamo Raya.



a. Salah satu gedung kantor milik Pemda Kab. Mamberamo Raya yang lokasinya kantor berada dalam kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja_©John Mampioer)



b. Logpon milik HPH PT. Mamberamo Alas Mandiri di Kab. Mamberamo Raya (areal konsesinya berada dekat kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja_©John Mampioer)



c. Pembangunan sarana jalan untuk mendukung pembangunan dan menghubungkan kampung-kampung yang dilakukan Pemda Kab. Mamberamo Raya melintasi kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja_©John Mampioer)

